



**KEGIATAN WORKSHOP WORKSHOP
PENGOLAHAN DATA ANALISA KEBENCANAAN BPBD
PROVINSI JAMBI,**

Hotel Ratu , Tanggal 3 s/d 5 September 2019



**LAPORAN
KEGIATAN WORKSHOP WORKSHOP
PENGOLAHAN DATA ANALISA KEBENCANAAN BPBD PROVINSI JAMBI,**

Shang Ratu , Tanggal 3 September 2019

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kondisi Geografis, Geologis, Hidrologis Dan Demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari tahap pra bencana, saat bencana sampai dengan pasca bencana.

Penanganan bencana perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat Saat ini data bencana yang tersedia di kementerian/lembaga, institusi, pemerintah daerah dan organisasi lainnya belum terintegrasi dengan baik, dimana format data dan informasi bencana masih beragam. Untuk itu diperlukan acuan sebagai pedoman dalam pengelolaan data dan informasi bencana. BPBD telah menyediakan sebuah sarana penyimpanan data dan informasi kebencanaan berupa perangkat lunak aplikasi Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dapat digunakan sebagai alat analisis kejadian dan dampak bencana. Yang didukung peralatan Komunikasi baik yang ada pada KOMOB dan komunikasi Handy Talky dengan perangkat pesawat Repiter

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi, pelaporan data dan informasi bencana di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Tujuan pedoman ini adalah :

1. Terciptanya pemahaman yang sama dalam pengelolaan data dan informasi bencana antara pusat dan daerah.
2. Tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi bencana di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota secara terpadu.

C. Tehnik Dan Fungsi

Dalam Penyampaian Informasi Menggunakan Pesawat Ht, Ini Memerlukan Keterampilan Dan Norma Berbicara Yang Santun Dan Tegass . Yang Intinya Informasi Tersebut Telah Memenuhi Maksud Dan Tujuan.

Umpamanya : Data Tersebut Telah Memenuhi Kreteria Laporan Bancana, Antara Lain :

1. Jenis Bencana
2. Tempat , Tanggal Dan Waktu Kejadian
3. Jumlah Kerugian :
 - A. Jumlah Korban (Kk / Jiwa)
 - B. Jumlah Kerusakan Rumah, Infrastruktur Atau Lahan (Rusak Berat, Rusak Ringan, Tergenang, Terendam, Hanyut Dan Lain Lain)
4. Langkah Langkah Yang Telah Diambil
5. Dan Perkiraan Kebutuhan Yang Mendesak

Sedangkan Fungsinya Meliputi ;

Pertama ; Melaporkan Hasil Pemantauan Langsung Dan Pengkajian Dan Analisa Data Awal Sesegera Mungkin Saat Atau Setelah Terjadi Bencana.

Kedua ; Membantu Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Bpbd Provinsi Kabupaten / Kota Untuk Kegiatan :

- a. Mengaktivasi Posko Pb Kabupaten / Kota Dan Di Lapangan
- b. Mempelancar Koordinasi Dengan Seluruh Sektor Yang Terlibat Dalam Penanganan Bencana
- c. Menyampaikan Saran Yang Tepat Dalam Untuk Upaya Penanganan Bencana.

Ketiga ; Melaporkan Hasil Pelaksanaan Asessesment (Pendataa) Secara Periodik Kepada Kepala Pelaksana Bpbd Dan Posko Bencana Secara Langsung

- a. Laporan Awal Setelah Tiba Diloksi Bencana
- b. Laporan Berkala / Perkembangan (Harian Dan Insidentil Khusus
- c. Laporan Lengkap / Akhir Penugasan.

D. Sasaran

Sasaran Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia adalah BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota, instansi/lembaga terkait khususnya pengelola data dan informasi bencana agar dapat dijadikan sebagai acuan data kebencanaan di Indonesia.

Penginformasian data kejadian bencana secara cepat, tepat dan akurat, saat ini sangat mutlak dilakukan oleh petugas dilapangan terutama bagi anggota TRC penanggulangan bencana. Hal ini didasari oleh alasan bahwa :

1. Laporan (data) sementara kejadian bencana harus cepat sampai kepada pengambil keputusan minimal 3 jam setelah terjadi bencana .
2. Hasil laporan (data) sementara dapat dijadikan langkah awal untuk mengambil kebijakan dalam penanganan bencana
3. Hasil analisa laporan (data) dapat dijadikan pedoman dalam menyusun kebutuhan hidup dasar, baik pada masa tanggab darurat (saat bencana) maupun pasca bencana.

Saat ini BNPB telah memadukan dan mengembangkan sistem pelaporan dan pengolahan informasi (data) bencana dengan sistem anware. Sistem ini dimaksudkan agar laporan / informasi bencana yang masuk dapat segera dianalisa kedalam jaringan software pusat data dan kehumasan (pusdatinmas) BNPB RI.

Untuk membantu informasi dan komunikasi kebencanaan petugas lapangan harus memiliki skill berkomunikasi dalam menyampaikan informasi (data) **baik dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan tidak terjadi bencana.**

Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Jambi nomor 28 tahun 2016 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan peraturan gubernur jambi tersebut, pemerintah provinsi jambi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Workshop Pengolahan Data Analisa Kebencanaan BPBD Se – Provinsi Jambi.

I. Peserta workshop

Peserta Workshop Pengolahan Data Analisa Kebencanaan berasal utusan dari BPBD seluruh Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi. Berjumlah 30 (tiga puluh) orang dan merupakan anggota TRC dan Petugas Pengolahan Data Bencana.

II. Maksud dan tujuan

1. Menciptakan tenaga yang profesional yang mampu memberikan informasi (data) dan komunikasi kebencanaan yang cepat, tepat dan akurat.
2. Menciptakan tenaga profesional yang memiliki inovasi – inovasi dalam penggunaan alat komunikasi baik dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan tidak terjadi bencana.

III. Sumber dana

Sumber pendanaan kegiatan workshop ini bersumber dari dana APBD 2019 BPBD Provinsi Jambi .

